

# **Peranan, Strategi dan Pola Pengembangan Pendidikan Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Inhil yang Berwawasan Maju dan Gemilang 2025**

**Telah dibentangkan dalam Seminar Nasional "Wujudkan Tembilahan Kota Pendidikan Menuju Indragiri Berjaya dan Gemilang 2025, pada Disember 2011 Dewan Engku Kelana Indragiri Tembilahan Riau 2010**

**Oleh**  
**Dr. Rafiuddin Afkari bin Hj. Abdul Fattah**  
**Jabatan Kemanusiaan**  
**Fakulti Sains Sastera dan Warisan**  
**Universiti Tun Hussein Onn Malaysia**  
rafiuddin@uthm.edu.my

## **A. PENDAHULUAN**

Sebelum masuk ke pembahasan utama dan judul utama dalam seminar pendidikan ini, sebaiknya penulis melihat rancangan dan rencana strategi pembangunan pendidikan di Inhil sebagaimana yang tertulis di website [www.inhilkab.go.id](http://www.inhilkab.go.id)

## **B. RENCANA STRATEGI**

### **RENCANA LIMA TAHUN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (2009-2014)**

#### **1. Pemerataan dan Perluasan Akses**

Berbagai langkah kegiatan untuk memperluas akses pendidikan non formal adalah:

1. Peningkatan dan promosi melalui berbagai media mengenai pentingnya PNF dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dari usia dini hingga usia lanjut, yang disertai menu-menu program yang dapat menggugah, menarik, dan membangkitkan semangat untuk belajar dan/atau berperan dalam penyelenggaraan PNF ;
2. Mendorong dan memberdayakan masyarakat melalui berbagai organisasi sosial masyarakat (Orsosmas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berorientasi pada kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya serta kelompok masyarakat terdidik untuk dapat berperan dalam penyelenggaraan PNF ;
3. memberikan bantuan pembiayaan sampai pada kabupaten/kota, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya PNF bagi Pemda kabupaten/kota sehingga terdorong untuk menyediakan anggaran PNF yang memadai melalui APBD;
4. Mendorong terbentuknya berbagai organisasi kemasyarakatan di berbagai tingkat yang berperan sebagai mitra dalam pengembangan PNF ;
5. memperluas kerja sama dengan Instansi terkait dalam penyelenggaraan PNF ;
6. Penyediaan, pemberian dan penyaluran block grants yang dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak kemitraan dengan lembaga-lembaga luar negeri yang terkait dengan pengembangan program PNF.

Pengembangan pendidikan kesetaraan, yang diarahkan pada anak usia dini Wajar Dikdas 9 tahun melalui Paket A setara SD, dan Paket B setara SMP, serta Paket C setara SMA. Pengembangan paket kesetaraan dilakukan melalui pembukaan kelompok-kelompok belajar pada sasaran yang terfokus, yaitu pada daerah yang APK-nya sangat rendah. Hingga tahun 2009, target Paket A untuk siswa putus SD kelas 4 sampai dengan 6 sebanyak kurang lebih 25% dari DO SD, dan target Paket B setara SMP akan menjangkau sekitar 50% dari lulus SD tidak melanjutkan dan 50% dari putus SMP, dan target penyelenggaraan program Paket C setara SMA akan menjangkau sekitar 50% dari lulusan SMP tidak melanjutkan dan 25% dari putus SMA.

Dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan kesetaraan dilakukan berbagai strategi, antara lain:

1. Sosialisasi pendidikan kesetaraan melalui kampanye dan pertemuan forum kesetaraan, serta perluasan akses pendidikan kesetaraan dengan pemberdayaan masyarakat melalui layanan home schooling, kelas berjalan (Mobile education service) ;
2. Pemberdayaan pondok pasantren dan kerja sama dengan Instansi terkait ;
3. Penajaman pelayanan khusus pendidikan kesetaraan, antara lain melalui pelayanan daerah terbelakang dan daerah bencana, pendidikan kesetaraan di luar negeri, dan pembantu rumah tangga anak (PRTA).

## **2. Perluasan Pendidikan Wajar pada Jalur Non Formal**

Termasuk kebijakan strategis untuk mendukung program Wajar. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi (APM/APK) Dikdas melalui program Paket A dan Paket B. Program ini sangat strategis untuk menjangkau peserta didik yang memiliki berbagai keterbatasan untuk mengikuti pendidikan formal, terutama untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, daerah tepencil, daerah tertinggal, daerah konflik, atau anak-anak yang terpaksa bekerja.

## **3. Perluasan Akses Pendidikan Keaksaraan Bagi Penduduk Usia > 15 tahun**

Merupakan kebijakan dalam rangka memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi penduduk buta aksara. Hal ini dimaksudkan mendorong penduduk usia > 15 tahun untuk mengikuti kegiatan keaksaraan fungsional agar memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung sesuai dengan standar kompetensi keberaksaraan. Melalui kebijakan strategis ini diharapkan akan menurunkan jumlah penyandang tiga buta, yaitu buta aksara latin dan angka arab, buta bahasa Indonesia dan buta pengetahuan dasar.

Publik, perlu disusun rencana Lima Tahun Pembangunan Pendidikan. Subtansi rencana Lima Tahun Pendidikan mencakup program-program prioritas yang dapat menyelesaikan bermacam-macam dalam mencapai target sasaran pembangunan Pendidikan tata kelola dan pencitra berbagai masalah dihadapi di lapangan. Rencana tersebut selain berorientasi kepada di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009-2014 yang meliputi pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan, Peningkatan Kualitas, daya saing yang relefansi Pendidikan serta penguatan kebijakan yang ditetapkan secara nasional yang didasarkan kepada kebijakan pembangunan pendidikan di daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di

lapangan, disamping itu kemampuan dana pemerintah dan daerah serta partisipasi masyarakat menjadi faktor pertimbangan dalam penyusunan lima tahun Pendidikan Luar Sekolah (PNF) di Provinsi Riau.

Program prioritas tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan pokok yang terukur sebagai langkah-langkah untuk mencapai target sasaran (indikator keberhasilan) yang ditetapkan. Dengan demikian sasaran pokok penyusunan rencana lima tahun pendidikan tahun 2009-2014 mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan keberhasilan program nasional maupun daerah yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **4. Pemerataan dan Perluasan Akses**

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dalam aspek pemerataan dan perluasan akses pendidikan yaitu meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) memberikan gambaran tentang persentase warga masyarakat usia sekolah yang mengikuti pendidikan pada setiap jenjang Program Paket A setara SD. Dalam meningkatkan APK tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk menampung siswa seperti unit sekolah baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RBK) dan tenaga pendidik (Guru) dan kependidikan yang memadai dalam melaksanakan pelayanan pendidikan di sekolah. Disamping itu, bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu perlu diberikan bantuan beasiswa sehingga dapat meneruskan pendidikan tanpa putus sekolah. Kegiatan pokok yang diprioritaskan dalam pemerataan dan perluasan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun 2009-2014 berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut :

#### **5. Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga PAUD (KB,TPA dan SPS)**

Untuk menunjang anak usia dini 0-6 tahun diperlukan lembaga Paud yang terdiri dari pendirian KB, TPA dan SPS. Jumlah lembaga Paud di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2009 50 lembaga. Lokasi Paud masih dominan di ibu kota Kabupaten dan Ibu Kota kecamatan, dalam rangka memperluas pemerataan daya tampung anak usia dini perlu dikembangkan sampai ketinggian desa/ kelurahan terkait dengan capaian masing-masing harus memiliki lembaga paud baik KB, TPA ataupun SPS sehingga 2009-2014 anak usia dini dapat tertampung dijenjang Non Formal dan Informal.

### **B. STRATEGI DAN POLA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI INHIL**

Strategi dan pola pengembangan pendidikan di Inhil akan lebih berkembang dan maju menuju wawasan 2025 jika peranan institusi pemerintah, legeslatif dan masyarakat bergandeng bahu untuk merealisasi dengan serius program-program pendidikan di Inhil. Hal yang dianggap sangat penting bagi penulis makalah ini ialah sebagai berikut:

## **1. PENDIDIKAN SEBAGAI ASET MASA DEPAN**

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari pertumbuhan dan pengembangan pendidikan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kunci dasar dari suatu negara. Pendidikan sering diibaratkan sebagai lambang kekuatan, kewibawaan dan kebesaran dari suatu bangsa dimanapun di dunia ini. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kebutuhan asasi manusia, tidak terkecuali di Inhil. Hal ini sudah dijelaskan dalam pada alenia 4 dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan negara ialah adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dalam Pasal 31 UUD 1945 ini juga disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Upaya konkrit yang perlu dipacu adalah mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan pendidikan. SDM sangat diperlukan untuk pembangunan sektor industri dan sektor lainnya atau dapat memanfaatkan SDM yang dihasilkan oleh pembangunan pendidikan. Program pendidikan di Inhil untuk memajukan pendidikan sudah semakin dirasakan seperti perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi. Secara teoritis bahwa pendidikan akan menimbulkan differensiasi kerja. Hal ini tidak dapat disangkal, sebab pendidikan dengan berbagai jenis dan jenjang, baik pendidikan formal maupun non formal akan memberikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap pada subjek didik dalam berbagai bidang dan aspek. Manusia terdidik akan memiliki daya cipta, rasa, karsa dan karya, dan pada saatnya manusia itu akan terjun ke lapangan kerja dan sedapat-dapatnya mencipta lapangan kerja. Hal ini boleh di contohi seperti negara berkembang dan menuju negara maju seperti Brunei, Singapore, Malaysia, Korea, China dan Jepang sangat mementingkan nilai-nilai Sumber Daya Manusia demi kemajuan masyarakat, negara dan bangsanya.

## **2. MEMPERSIAPKAN SDM YANG TERAMPIL, BERKUALITAS DAN PRODUKTIF.**

Kebutuhan pembangunan pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin mutlak diperlukan manusia yang memiliki kualitas. Untuk memenuhi tuntutan tersebut salah satu jalannya adalah melalui proses pendidikan. Realitas yang dialami bangsa kita hari ini bahwa kualitas pendidikan masih dirasakan belum memadai. Pertanyaannya bagaimana mencapai hasil pendidikan yang berkualitas terutama dalam menghadapi pembangunan yang menimbulkan transformasi dalam segala sektor pembangunan sehingga mampu menjadi manusia yang maju dan modern?

Propinsi Riau pada umumnya (dengan Program K2i) dan kabupaten Inhil khususnya (RENCANA STRATEGI LIMA TAHUN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (2009-2014) sebagai bagian yang sedang dengan gencar-gencarnya melaksanakan berbagai program pembangunan, menuntut tenaga terdidik dan terlatih puluhan ribu atau ratusan ribu orang. Keperluan tenaga tersebut perlu disiapkan untuk tersedia dan dapat diambil oleh penduduk Riau dan peluang emas yang sedang dan akan terbuka luas.

1. Bagaimana strategi dan pola pendidikan di Riau yang dapat mengantisipasi segala program yang tersedia?
2. Apakah dapat diadakan program-program khusus pendidikan di Riau supaya peluang emas tersebut dapat diraih semaksimal mungkin?
3. Program pendidikan apa yang dapat dilaksanakan?

#### 4. Sejauhmanakah realisasinya?

Dan banyak pertanyaan yang dapat dimunculkan lagi. Namun yang perlu dibincangkan adalah apa yang dapat dibuat dan direalisasikan secepatnya dan pada jangka panjang sehingga lulusan pendidikan benar-benar mampu berkarya dalam proses transformasi budaya yang tetap berkeperibadian Indonesia.

**Permasalahan pendidikan di Riau** umumnya dan di Inhil khususnya yang perlu dirungkai dan mencari solusi yang terbaik demi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan usaha perbaikan infra struktur pendidikan yang perlu diperbaiki secara bertahap. Usaha dan upaya untuk memperbaiki perbaikan pendidikan di Inhil melalui **(5 D)**:

##### 1. Dengan Memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam konteks ini adalah tenaga pendidik (Guru) berperanan penting untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini di masa yang akan datang. Tenaga Pendidik (Guru) adalah orang yang memiliki tugas yang sangat berat untuk mencerdaskan anak bangsa di dalam mewujudkan pendidikan bermutu dan berkualitas tinggi. Pendidikan bermutu dan berkualitas tinggi ditentukan oleh banyak faktor dan indicator seperti anggaran (*bajet*), sarana pendidikan dan pembelajaran (*infra struktur*), dan dukungan sepenuhnya dari institusi pemerintah (*eksekutif dan legeslatif*) untuk bergandeng bahu memartabatkan dunia pendidikan sebagai aset bangsa masa yang akan datang.

Jika dikaji masalah SDM guru, maka banyak persoalan yang akan muncul (a) kualitas guru yang masih harus diperbaiki seperti pengenalan teknologi pembelajaran dan pendidikan melalui media dan internet, penguasaan guru-guru dalam pertuturan bahasa inggris dalam menyampaikan subjek-subjek bahasa inggris, penguasaan subjek-subjek mata pelajaran sesuai dengan kepakaran guru masing-masing subjek masih harus diperhatikan oleh dinas yang berkaitan, dan lain-lainnya. (b) Mobilisasi guru-guru tidak merata. Guru dipertanian ternyata kelebihan dan guru-guru di pedesaan masih kekurangan. (c) kualitas guru yang masih sangat perlu ditingkatkan, hal ini terlihat, bahwa terjadi kesenjangan antara kualitas guru di kota dengan di desa, guru di kota selalu belajar dan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, workshop, dan lokakarya, terutama berkaitan dengan kurikulum baru. Guru-guru di kota di dalam meningkatkan kualitas dirinya memiliki peluang yang lebih besar, apalagi sekarang sedang digalakkan pendidikan berbasis teknologi, misalnya melalui jaringan internet, website, komputerisasi, dan sistem multi media lainnya. Guru-guru di desa tentunya terasa gamang teknologi (gatek), sehingga pembelajaran berbasis teknologi baginya terasa asing. Bagaimana mutu akan meningkat kalau penguasaan teknologi ini belum merata di miliki oleh para guru-guru, khususnya di daerah pedesaan; (d) kualifikasi akademik guru, ini masih kita rasakan, karena masih banyak guru-guru terutama lulusan SMA sederajat yang mengajar pada tingkat sekolah dasar. Bagaimana mereka akan melakukan proses pembelajaran secara baik, dari aspek keilmuannya saja masih rendah, belum lagi aspek didaktik, metodik dan pedagogic yang belum pernah mereka dapatkan, dan bagi mereka istilah itu asing. Data menunjukkan bahwa jumlah guru di Propinsi Riau adalah 65.528 orang, guru yang berkualifikasi S1 sejumlah 12.434 orang, yang berkualifikasi S2 sejumlah 240 orang, dan yang belum berkualifikasi S1 sejumlah 52.854 orang. Apalagi dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, ditetapkan bahwa kualifikasi akademik guru, di mulai dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah minimal S-1 atau D-IV. (Azyumardi Aza. *Paradigma Pendidikan*

*Nasional.....2002, Aulia Reza Bastian.Reformasi Pendidikan.2002 dan Isjoni. Wajah Baru Pendidikan kita & Peranan Guru dan Kemajuan Sekolah. 2005)*

## **2. Dengan Meningkatkan Anggaran Pendidikan.**

UUD 1945 yang sudah diamandemen, UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa alokasi dana untuk sector pendidikan minimal sebesar 20 % dari APBN, APBD Propinsi dan APBD kabupaten/kota. Ternyata setakat ini pemerintah belum merealisasikan 20 % APBN untuk sector pembangunan, tahun 2006 saja hanya berkisar dibawah 7 %, dan tahun 2007 diestimate kurang dari 10 %, dan kapan baru terwujud angka 20 %, dan pemerintah berjanji tahun 2009 anggaran yang ditargetkan itu tercapai.

Hanya komitmen pemerintah pusat dan daerah yang sangat tinggi yang dapat membangunkan dan memartabatkan dunia pendidikan ini lebih maju ke depan. Anggaran pendidikan 20% sangat menentukan arah pendidikan dan pembangunan SDM anak-anak bangsa kita. Negara yang sudah maju katakanlah Eropa, atau dekat-deka aja negara tetangga kita Singapore, Brunei, Malaysia dan Thailand mereka lebih mendahulukan sektor pendidikan karena negara itu tahu bahwa kemajuan negara ***mereka ditentukan bagaimana pemerintahnya menggesa masalah pendidikan lebih diberikan perhatian*** dibanding sektor yang lainnya

Menurut pendapat pemakalah, berkembangnya suatu Negara sangat ditentukan oleh SDM masyarakatnya, dan kualitas SDM ditentukan oleh perkembangan kemajuan pendidikan Negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan bermutu sangat ditentukan oleh alokasi anggaran (dana), dan anggaran tersebut diperuntukan untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan SDM, dan factor penunjang pendidikan lainnya. Negara yang memiliki alokasi dana yang besar diperuntukan untuk pembangunan pendidikan, maka terlihat negara tersebut menjadi negara besar, dihormati dan disegani oleh negara lain. Negara tersebut akan menguasai pangsa pasar, baik di bidang ekonomi maupun politik. Kita dapat mencontoh bangsa Jepang, Singapore, Rusia, Vietnam, Malaysia dan Thailand. Negara-negara tersebut di atas mengutamakan pembangun pendidikan sebagai prioritas utama negara, maka dalam waktu singkat menjadi Negara yang maju, disegani dan dihormati bangsa lain.

## **3. Dengan Memperbaiki Sarana dan Prasarana Sekolah.**

Sarana dan prasarana sekolah adalah merupakan pusat sumber belajar para murid, dan salah satu faktor penentu terhadap keberhasilan proses pembelajaran, dan juga salah satu penentu di dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kita menyaksikan bagaimana kondisi perpustakaan di sekolah, perpustakaan sekolah seharusnya diberi perhatian serius dan alokasi anggaran harus diupayakan semaksimal mungkin baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Pengadaan buku oleh pemerintah pusat selama ini harus dibenahi dan diperbanyak supaya nuansa pembelajaran memenuhi tuntutan kurikulum.

Selanjutnya kondisi sarana dan prasarana laboratorium yang tidak layak pakai, bahwa sudah tidak *up to date* lagi. Tidaknya hanya ruang laboratorium sebagai tempat praktek siswa yang tidak dimiliki oleh sebagian besar sekolah. Bahkan masih banyak sarana dan prasarana pendidikan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, dan semua itu menjadi penunjang bahkan penentu terhadap keberhasilan proses pembelajaran guru. Hal ini akan menjadi penentu pula di dalam keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

#### **4. Dengan Memperbaiki Menegement (pengelolaan) Sekolah**

Management dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengelolaan, dan pengelolaan tersebut lebih diarahkan kepada pengelolaan pendidikan. Bagaimana pendidikan kita mampu melakukan perubahan, sehingga kita dapat menemukan pola dan strategi yang dapat memberikan solusi terhadap kemerosotan pendidikan kita.

#### **5. Dengan Meningkatkan Motivasi Diri**

Ini adalah kunci dari keberhasilan menuju pendidikan bermutu, tidak hanya diandalkan dengan alokasi dana yang besar didalam pembangunan sektor pendidikan, kalau pelaksana tidak memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi. Maka, akan sia-sialah alokasi anggaran untuk pembangunan pendidikan, jika oknum pelaksana memiliki motivasi kerja rendah. Apa yang dirancang dengan mengorbankan moril dan materil, akan menjadi tidak berarti apa-apa dan sasaran kita untuk mewujudkan pendidikan bermutu tidak akan pernah tercapai. Solusi yang Ditawarkan Sumber Daya Manusia (SDM) perlu untuk ditingkatkan, kalau kualitas guru yang menjadi kendala, maka pemerintah harus mengangkat tenaga pendidik (guru), sehingga kekurangan guru dapat di atasi. Ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Riau. Bila mobilitas guru yang tidak merata, maka perlu kebijakan terpadu, dan kebijakan mutasi guru harus dikaji ulang, dan antar kabupaten dan kota perlu koordinasi yang sinergis. Kalau kualitas guru yang masih rendah, maka para guru diberikan diklat, workshop, lokakarya, baik tingkat daerah, nasional kalau perlu internasional. Demikian pula halnya kualifikasi akademik guru yang belum memenuhi syarat, maka berikan kesempatan kepada guru untuk melanjutkan pendidikannya, sehingga apa yang dipersyaratkan UU dapat dipenuhi. alokasi anggaran perlu diberikan skala prioritas pada sektor pendidikan. Kita perlu pendidikan itu bermutu, maka alokasi anggaran lebih diperbesar.

#### **4. STRATEGI DAN POLA PENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN SDM**

Pendidikan merupakan sektor yang sangat memerlukan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk mencapai sasaran tersebut GBHN telah menggariskan tujuan pembangunan, yaitu *pertama*, menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk mewujudkan kesejahteraan lahir bathin yang lebih selaras, adil dan merata.

*Kedua*, meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan selanjutnya. Sejalan dengan itu, maka sasaran pembangunan Indonesia adalah tumbuhnya sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat melalui peningkatan peran serta, efisiensi dan produktivitas rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir bathin.

### **A. Strategi Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional**

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menggariskan berbagai strategi. Berdasarkan GBHN 1993 ditetapkan empat strategi dasar ; pendidikan nasional untuk lima tahun berikutnya, yaitu: 1) pemerataan kesempatan, 2) relevansi, 3) kualitas, dan 4) efisiensi.

#### **1) Pemerataan**

Dalam aspek pemerataan kesempatan terkandung tiga erti, yaitu: a) persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), b) aksesibilitas, dan c) keadilan dan kewajaran (*equity*). Ekuualitas berarti bahwa setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang menurut UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, ekonomi, agama dan lokasi geografis.

#### **2) Relevansi**

Idealnya adalah bahwa pendidikan relevan dengan berbagai kebutuhan. Namun pada akhirnya perlu diambil keputusan mengenai manakah di antara kebutuhan dan kepentingan itu yang akan menjadi prioritas pada suatu kurun waktu tertentu.

#### **3) Kualitas atau Mutu**

Kualitas pendidikan dapat merujuk kepada kualitas proses dan kualitas produk. Suatu pendidikan disebut bermutu dari segi proses (yang juga sangat dipengaruhi kualitas masuknya) jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif. Peserta didik atau murid mengalami proses pembelajaran yang bermakna, ditunjang oleh sumber daya (manusia, dana, sarana, dan prasarana).

#### **4) Efisiensi**

Namun dalam pandangan kontemporer bukan hanya biaya yang menjadi ukuran efisiensi, melainkan keefektivan atau kualitas hasil. Dalam konteks yang luas, efisiensi berkaitan dengan profesionalisme dalam manajemen nasional pendidikan yang di dalamnya terkandung disiplin, kesetiaan, keahlian, etos, *cost-effectiveness*; dan lain sebagainya.



## **B. Konsep dan Strategi Pokok Operasional ”Link and Match”**

Dari perspektif ini, *link* menunjukkan pada proses yang berarti bahwa proses pendidikan selayaknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasilnya pun *cocok (match)* dengan kebutuhan tersebut, baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi, maupun dari segi waktunya. Konsep *link and match* pada dasarnya *supply-demand* dalam arti luas, yaitu dunia pendidikan sebagai penyediaan SDM, dan individu, masyarakat serta dunia kerja sebagai pihak yang membutuhkan.

Pada tingkat SD: (1) meningkatkan kemampuan baca-tulis-hitung, termasuk baca tulis kritis; (2) memaksimalkan muatan lokal untuk kemampuan kegiatan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan sejauh mungkin melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini.

Pada Tingkat SMP: (1) melibatkan peran serta masyarakat dalam pengisian muatan lokal; (2) memperkuat pendidikan yang memberikan keterampilan dasar bagi peserta didik; (3) mengadakan kegiatan kunjungan dan praktek lapangan yang dikaitkan dengan muatan lokal atau kegiatan ekstra kurikuler (4) meningkatkan penggunaan media dan alat pembelajaran yang diambil langsung dari lingkungan; dan (5) melengkapi sarana, prasarana, dan tenaga untuk menangani program ini.

Pada tingkat SMA: (1) melibatkan masyarakat dalam mengisi muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan setempat; (2) menggiatkan kunjungan lapangan, praktek lapangan di dunia kerja pada waktu tertentu; (3) meningkatkan kerja sama yang lebih intensif dan ekstensif dengan dunia usaha dan dunia industri; dan (4) melengkapi sarana, prasarana, dan tenaga untuk menunjang program ini.

Pada tingkat SMK: (1) meningkatkan program magang di dunia usaha/industri selama jangka waktu tertentu; (2) menggiatkan kunjungan lapangan dan praktek lapangan sebagai bagian integral dan kurikulum; (3) meningkatkan jumlah dan mutu sarana, prasarana dan tenaga; dan (4) meningkatkan daya tarik sekolah sebagai pilihan yang mempunyai prospek yang baik untuk masa depan.

Pada tingkat Perguruan Tinggi; (1) meningkatkan dialog dan kerja sama dengan dunia kerja, dunia usaha, dan industri dalam bidang pendidikan dan penelitian; (2) meningkatkan kegiatan praktek lapangan, kuliah kerja, dan magang sesuai dengan bidang studinya dengan menggunakan sistem kupon; (3) meningkatkan jumlah mahasiswa yang masih mempelajari sains dan teknologi sampai sekitar 25% dari seluruh populasi mahasiswa; dan (4) memperkuat sarana, prasarana, dan tenaga baik untuk program akademik maupun profesional.

Untuk mewujudkan kebijakan *link dan match* beserta strategi pokok operasionalisasinya, diperlukan sosialisasi kepada lingkungan intern pendidikan dan masyarakat umumnya, yang meliputi penyamaan persepsi, pengembangan komitmen, dan penyusunan rencana tindakan.

## **5. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERDASARKAN KONSEP OTONOMI DAERAH**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan. Pembangunan pendidikan berdasarkan konsep otonomi daerah

yang nyata dan benar-benar dilaksanakan akan mempunyai pengaruh positif untuk pencapaian tujuan pendidikan, yaitu terwujudnya manusia bermutu/berkualitas yang mampu membangun dirinya dan pembangunan masyarakat dan bangsanya, dan pada waktunya mampu memperoleh kesejahteraan lahir dan bathin.

Jika otonomi pendidikan dapat dilaksanakan secara benar dan konsisten, maka akan dapat dicapai secara bertahap tujuan pendidikan, terutama dikaitkan dengan peningkatan SDM bermutu.

Berkenaan dengan otonomi pendidikan di era otonomi daerah ini para pengambil kebijakan perlu memperhatikan *tiga aspek* berikut untuk kemajuan pendidikan di Inhil khususnya dan di Riau umumnya di masa yang akan datang.

- 1) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran perlu dilakukan agar semakin hari semakin baik. Hal ini disebabkan disamping telah adanya sistem manajemen dan administrasi yang semakin baik baik, juga kualitas tenaga pengajar semakin tinggi. Begitu juga kualitas interaksi dalam proses belajar mengajar dengan sendirinya semakin memenuhi persyaratan kualitatif.
- 2) Pelaksanaan penelitian. Penelitian ilmiah yang dilakukan selama ini relatif berkembang, begitu pula dana atau anggaran yang dialokasikan untuk penelitian semakin meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi sayang sekali belum terlihat sumbangan hasil-hasil penelitian tersebut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Pengabdian pada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian terpenting dalam misi suatu universitas. Walaupun aspek pengabdian pada masyarakat ini secara implisit juga tercakup di dalam dua dharma sebelumnya (pendidikan dan penelitian), namun haruslah secara khusus dan profesional menangani aktivitas pengabdian masyarakat.

### **C. INHIL BERWAWASAN MAJU DAN GEMILANG 2025**

Saya yakin dan penuh komitmen bahwa Inhil akan maju dan gemilang dalam dunia pendidikan menjelang tahun 2025 sekiranya pemerintah daerah baik eksekutif, legeslatif, masyarakat dan tokoh pendidik, tokoh akademik bergandeng bahu untuk memberikan sumbangsih pemikiran yang jitu demi kemajuan pendidikan di Inhil, namun rintangan dan halangan akan dilalui sebagai berikut:

- (i) Pemerintah dan pemimpin Inhil harus bersatu padu dengan satu tujuan dan mempunyai inisiatif yang baik yaitu menjadikan dunia pendidikan sebagai aset daerah dimasa yang akan datang. Bila gagasan dan wawasan ini wujud maka akan lahir daerah yang aman, adil, harmoni, saling menghormati dan akhirnya akan melahirkan kesetiaan politik pada daerah tersebut di masa yang akan datang.
- (ii) Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang dicapai serta gagah menghadapi berbagai masalah. Masyarakat Inhil harus memahami nilai-nilai, tujuan dan konsep pendidikan sehingga hasil kecemerlangan dapat dikongsi bersama dengan masyarakat.

- (iii) Mewujudkan masyarakat yang berakhlakul karimah dan beretika, dimana masyarakatnya berpegang teguh pada nilai-nilai dan syariat agama sehingga masyarakat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pembangunan daerah tersebut.
- (iv) Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan tinggi dan mempunyai wawasan maju ke depan, yang bukan saja menjadi pengguna teknologi tetapi juga menyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan;
- (v) Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu sistem sosial yang mana kepentingan masyarakat lebih utama daripada diri sendiri dan kebajikan insan tidak berkisar kepada daerah dan individu tetapi di sekeliling sistem kekeluargaan yang kukuh;
- (vi) Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonom yaitu masyarakat yang melaksanakan pemberian kekayaan daerah secara adil dan saksama di mana wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi.

## Reference

Almond, L. 1983. *The piece of physical education in school*. London: kogen Page

Arifin, Prof. Dr. Anwar 2005. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Balai Pustaka: Jakarta.

Afkari, Dr. Rafiuddin Hj. Abul Fattah. 2010. *Prosiding Seminar International Empayar Johor Riau*. Yayasan Warisan Johor.

Azra, Prof. Dr. Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke XVIII*. Mizan: Bandung.

Bain, L.L. 1988. Curriculum for critical reflection in Physical Education. In R.S. Brandit (ed.) *Context of the curriculum: ASCD yearbook*. Washington, DC: Association for Supervision and Curriculum Development.

Bunting, C. 1989. The Compatibility of physical education and outdoor education. *Journal of Physical Education, Recreation and Dance*.

BPS Propinsi Riau, *Hasil Sensus Penduduk 2000 Propinsi Riau* (Tahap I).

Dewey, J. 1938. *Experience and education*. NY. Collier Books.

Suwardi MS, Profesor. *Dari Melayu ke Indonesia; Peranan Kebudayaan Melayu Dalam Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Bangsa*.